



# Anggaran ruang publik Rp8,5 miliar

► Pelaksanaan tidak beres akan dibatalkan

Oleh Jumali  
 HARIAN JOGJA

**UMBULHARJO: Komisi I DPRD Jogja akhirnya sepakat penambahan anggaran untuk pengadaan ruang publik dalam APBD Perubahan 2008 sebesar Rp8,5 miliar atau naik Rp6,8 miliar dari APBD 2008. Namun jika pelaksanaannya tidak beres Dewan tidak akan segan-segan membekukan anggaran tersebut.**

Rencananya, anggaran tersebut akan direalisasikan untuk penyediaan sarana publik bagi warga Kota Jogja dan peningkatan fasilitas pemerintahan yang tersebar di 14 kecamatan se Kota Jogja. Untuk fasilitas pemerintahan yang diajukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Kota Jogja terdapat 6 lokasi, sedangkan untuk fasilitas publik di 5 lokasi. Kelima lokasi tersebut diantaranya di Kelurahan Bumijo, Tahunan, Notoprajan, Panembahan dan Klitren.

1. Pemkot Jogja<sup>c</sup> menargetkan  
 2. pengadaan tanah ruang terbuka/  
 3. publik dalam RPJMD 2007-2011, di  
 4. 2011 ditargetkan tiap kelurahan terdapat satu ruang terbuka publik.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Jogja, Ardianto, Rabu (10/9) menga-

takan, jika kesepakatan yang ada di pihaknya, saat ini memperlihatkan perkembangan dari penganggaran tersebut. Komisi I menyepakati untuk memasukkan anggaran tersebut dalam APBD Perubahan 2008, namun masih akan mencermati realisasinya.

"Kami sepakati dulu, dengan alasan waktu yang ada dalam pembahasan APBD Perubahan 2008 yang sempit, namun jika dalam realisasinya ternyata memperlihatkan hal yang berbeda maka kami pastikan anggaran itu tidak bisa dicairkan," katanya.

Selain karena alasan tersebut, ungkap dia, keputusan tersebut diambil karena Komisi I juga belum lihat secara langsung kondisi fisik tanah yang akan dijadikan fasilitas pemerintahan dan ruang publik tersebut.

"Kami masih akan melihat kondisinya seperti apa? Apakah sudah memenuhi kriteria sebagai ruang publik seperti tanah tersebut biasa digunakan untuk bermain anak dan kegiatan olahraga ataupun kondisi tanah yang kritis dan perlu diselamatkan karena takut nantinya ruang yang ada di wilayah tersebut hilang," terang dia.

Meski waktu pembahasan yang dimiliki Komisi I singkat, tandas dia, namun pihaknya optimistis waktu dua pekan yang diberikan untuk menyerap aspirasi warga

dan melakukan pemantauan lokasi tanah yang akan dijadikan sarana publik tersebut akan selesai.

"Kami yakin mampu, nantinya setelah selesai di Komisi I, akan kami ajukan ke Panitia Anggaran," tukas dia.

Anggota Panggar DPRD Kota Jogja, Henri Kuncoroyekti juga memberikan sinyal dana itu akan disetujui. Namun dia mengatakan, jika Pemkot Jogja harus konsekuen. Pihaknya tidak menginginkan adanya temuan dari BPK atas sertifikat lahan di bekas Terminal Umbulharjo, terjadi di program tersebut.

"Kami minta untuk kali ini BPBD untuk lebih teliti lagi dalam pengelolaan aset, kami tidak ingin program yang punya konsep yang bagus seperti ini nantinya tidak jelas," tukas dia.

Walikota Jogja, Herry Zudianto dalam jawaban Walikota Jogja atas pandangan umum fraksi atas RAPBD 2008 Perubahan, mengatakan jika pengadaan tanah dalam APBD Perubahan 2008, bersifat mendesak dilaksanakan pembelian.

Sifat mendesak tersebut, didasarkan kepada kebutuhan pelayanan publik dan adanya ketersediaan tanah yang akan dijual dan memiliki nilai strategis bagi kebutuhan peningkatan pelayanan publik dan bagi aktifitas warga serta ketersediaan dana.

INSTANSI | NILAI BERITA | SIFAT | TINDAK LANJUT

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 April 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005